



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 31 Desember 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx (Rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Opin Soelistriyo Noegroho, S.H.,M.H., dan Bhary Fauzi Hermanto, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 77/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/I/2025 tanggal 10 Januari 2025;
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 14 April 1960 (umur 64 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, KRAMAT, JAWA TENGAH;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw tanggal 10 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 1981 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan Register nikah Nomor 419/74/X/1981 tertanggal 17 Oktober 1981;
2. Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan (akad Nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat Selama 8 tahun, dan terakhir tinggal dirumah bersama di RT.002 RW.003, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama 33 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama ;:
 - 1) Anak 1, laki-laki, lahir Tegal 16 Desember 1982 (sudah menikah dan mandiri);;
 - 2) Anak 2, laki-laki, lahir Tegal 07 Juni 1985 (sudah menikah dan mandiri);
 - 3) Anak 3, laki-laki, lahir Tegal 08 April 1990 (sudah mandiri);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun pada sekitar bulan Februari 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak terbuka akan penghasilan yang di perolehnya Tergugat juga jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan harus Penggugat minta terlebih dahulu kalaupun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tergugat sudah berusaha sering menasehati Tergugat namun justru marah-marah tanpa alasan yang jelas sering mengusir Penggugat. Hal tersebut berlangsung terus hingga puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 Penggugat yang sudah tidak

Halaman 2 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan akan sikap dan perlakuan Tergugat memilih untuk pergi dan tinggal di rumah anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX di xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang;

5. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tidak hidup bersama lagi selama 2 tahun 2 bulan, Dalam keadaan demikian tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ::

PRIMAIR;

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 13 Januari 2025 dan

Halaman 3 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat

:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxx Nomor 419/74/X/1981 tanggal 17 Oktober 1981, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saks

i:

1.-----SAK

SI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

Halaman 4 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN
TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi adalah sepupu Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-----Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
bersama di Desa xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

-----Bah
wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2022 mulai sering
bertengkar;

-----Bah
wa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

-----Bah
wa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah
ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya, di
samping itu Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada
Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2
(dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat
kediaman bersama;

-----Bah
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat;

-----Bah
wa selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan
sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah

Halaman 5 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----SAK

SI 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah

wa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-----Bah

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang sudah menikah dan mandiri;

-----Bah

wa tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu mulai sering bertengkar;

-----Bah

wa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya, di samping itu Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun;

-----Bah

wa selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak

Halaman 6 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



saling memperdulikan satu sama lain;

-----Bah
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan
nafkah untuk Penggugat;

-----Bah
wa sepengetahuan saksi, selama berpisah antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan keduanya
sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah
wa saksi sudah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan
Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan
kuasa hukum Penggugat dalam beracara di persidangan sebagaimana
pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kuasa
kepada Opín Soelistriyo Noegroho, S.H.,M.H., dan Bhary Fauzi Hermanto, S.H.,
Advokat yang berkantor di Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 07 Januari 2025 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan
Pengadilan Agama Slawi Nomor 77/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/I/2025 tanggal 10
Januari 2025;

Halaman 7 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jis. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum kuasa hukum Penggugat sah (legitimed) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pertimbangan Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw Tanggal 22 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

وَقَدْ نَادَىٰ يٰأَيُّهَا الْمُدْعَىٰ عَلَيْهِ أَتَيْتُكَ بِدَعْوَىٰكَ فَجَاءَ بِدَعْوَتِهِ فَمَا يَتَّبِعْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ فُتِنَ الَّذِينَ يَتَّبِعُ

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah

Halaman 8 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya, di samping itu Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lebih dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Tergugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 9 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti surat P.1 merupakan identitas Penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 dan Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya, di samping itu Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang sudah menikah dan mandiri;

Halaman 10 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



2. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak terbuka atas penghasilannya, di samping itu Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 (dua) tahun lebih;
4. Bahwa selama berpisah, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 11 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*

Halaman 12 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan selama jangka waktu tersebut sudah tidak pernah kembali, tidak pernah rukun lagi. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula antara keduanya sudah tidak menjalankan perannya masing-masing dalam rumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis, antar keduanya sudah tidak saling peduli dan saling perhatian lagi, maka telah terbukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat yang sangat terlihat jelas selama persidangan, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمَرْءِ

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II yang untuk

Halaman 13 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1/000|| è/ÀÁÂÃÄ åÄÅÆËÜÖÅ ÇÀÒ Ò
aÇGÖGÖMË RÏ ô/ÀËËÜÖÅZANÜÖs ãhÄÄÖP

24

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, sehingga petitum primer nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa saat dibacakannya putusannya, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya ban 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H dan Aziz Mahmud Idris, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Panitera Sidang,

Halaman 15 dari 16 halaman. .Putusan Nomor 270/Pdt.G/2025/PA.Slw



Siroyatun Nayyiroh, S.Ag

Perincian Biaya:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Penggugat				
c.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
Tergugat				
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	28.000,00
4.	Sumpah	:	Rp	50.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			:	Rp 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)